

## **Analisis ketimpangan pembangunan wilayahantar provinsi di Pulau Sumatera**

**Muhammad Ridho\*; Zulgani; Erni Achmad**

Prodi Ekonomi Pembangunan Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

*\*E- mail korespodensi: muhamadridho2101@gmail.com*

### **Abstract**

*Regional development inequality is a strategic issue that is currently being discussed. Sumatra Island has the highest development value when compared to other islands in Indonesia, so this purpose is to measure and analyze development assessments between provinces on Sumatra Island. As well as the influence of government participation, support, investment, labor and GRDP on regional development between provinces on the island of Sumatra. The research method used in this research is descriptive- quantitative analysis method. The value of regional development between provinces on the island of Sumatra from 2010 - 2019 has decreased every year. The results of panel data regression analysis using the Fixed Effect Model (FEM) approach, the resultsshow that the variables of government expenditure, investment and labor have a negative and significant effect on KPW. While the GRDP variable has a positive and significant effect on KPW.*

**Keywords:** *regional development inequality, williamson index, panel data regression*

### **Abstrak**

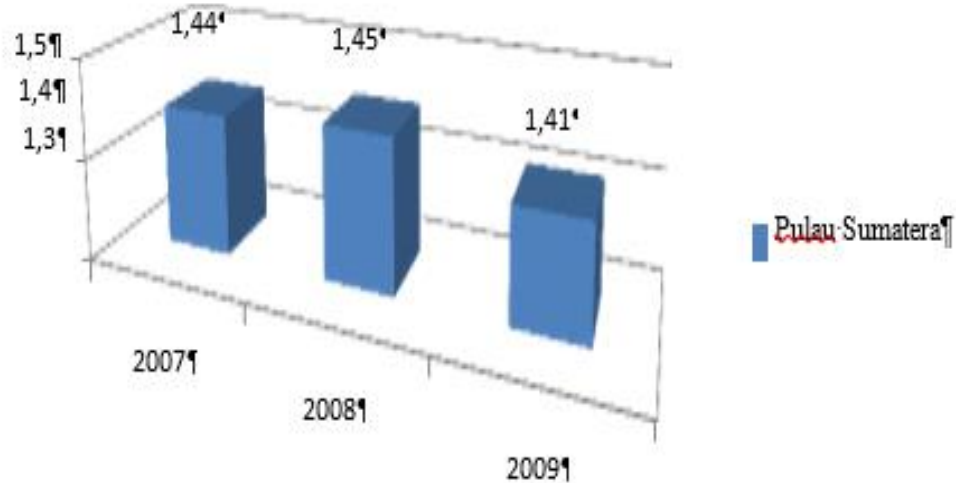
Ketimpangan pembangunan wilayah menjadi isu strategis yang dibahas pada saat ini. Pulau Sumatera memiliki nilai ketimpangan pembangunan paling tinggi jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis besar nilai ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera. Serta menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran, investasi, tenaga kerja dan PDRB terhadap ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera. Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif- kuantitatif. Diperoleh nilai ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2010 – 2019 mengalami penurunan setiap tahunnya. Hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), diperoleh hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah, pengangguran, investasi dan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap KPW. Di sisi lain, variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap KPW.

**Kata kunci:** ketimpangan pembangunan wilayah, indeks williamson, regresi data panel

### **PENDAHULUAN**

Salah satu permasalahan dalam perekonomian suatu negara yang sulit untuk dihindari yaitu ketimpangan pembangunan wilayah. Di Indonesia, ketimpangan pembangunan wilayah menjadi isu strategis yang dibahas hingga saat ini. Sama halnya terjadi di provinsi-provinsi Pulau Sumatera. Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya, baik dalam bentuk regulasi ataupun dalam bentuk anggaran untuk

mempersempit ketimpangan. Akan tetapi, hingga saat ini upaya tersebut masih belum mampu secara maksimal untuk menurunkan ketimpangan pembangunan. Berdasarkan laporan Bappenas tahun 2013, bahwa ketimpangan pembangunan antar provinsi menurut masing-masing pulau yang sangat tinggi pada tahun 2007 - 2009 adalah Pulau Sumatera.



Sumber: Bappenas, 2013(diolah)

**Gambar 1.** Indeks Williamson Pulau Sumatera Tahun 2007 - 2009

Dari Gambar 1 menunjukkan bahwa tahun 2007 nilai indeks williamson pulau Sumatera sebesar 1,44, tahun 2008 sebesar 1,45 dan tahun 2009 sebesar 1,41. Indeks williamson pulau Sumatera dari tahun 2007 - 2009 tergolong kedalam ketimpangan yang sangat tinggi, dikarenakan nilai indeks williamson  $> 1$ , yang berarti bahwa pembangunan antar provinsi di pulau Sumatera tidak merata.

Pertumbuhan perekonomian tidak dapat terlepas dari peranan pemerintah disebuah negara, salah satunya melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pertambahan permintaan agregat. Pengangguran merupakan permasalahan makroekonomi yang berdampak bagi manusia secara langsung dan dikategorikan berat. Menurut (BPS, 2014), pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Investasi merupakan faktor penting untuk mendorong ketersediaan cadangan modal dalam pembangunan wilayah. Investasi merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal dan meraih keuntungan pada masa yang akan datang.

Faktor lain yang dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan adalah tenaga kerja. Tenaga kerja diartikan sebagai penduduk yang berada pada batas usia setiaporang yang mampu melaksanakan pekerjaan, guna menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan, baik individu ataupun masyarakat. Menurut Dumairydalam (Asih, 2015), ketimpangan dan pertumbuhan sering kali menjadi perdebatan antara mendahulukan efisiensi dan pertumbuhan di satu pihak atau mendahulukan efektifitas dan pemerataan di pihak lain. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan kemakmuran masyarakat tercipta melalui pembangunan (Junaidi dkk., 2012).

Dari fenomena yang telah diuraikan, bermacam upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung, namun masih saja belum cukup sesuai untuk

mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah yang ada saat ini, khususnya di Pulau Sumatera. Sehingga, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “**Analisis ketimpangan pembangunan wilayah antar Provinsi di Pulau Sumatera**”.

## **METODE**

Untuk menjawab masalah pertama, maka digunakanlah indeks williamson. Model pengukuran indeks williamson pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan mengukur ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera periode 2010-2019. Formulasi indeks williamson antara lain sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{Y})^2 \cdot f_i/n}}{\bar{Y}}$$

Dimana:

$Y_i$  = PDRB per kapita daerah i (Provinsi)

$\bar{Y}$  = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah (Pulau Sumatera)  
 $f_i$  = Jumlah penduduk daerah i (Provinsi)

$n$  = Jumlah penduduk seluruh daerah (Pulau Sumatera)

Untuk menjawab masalah kedua, maka digunakanlah regresi data panel. Regresi data panel pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel pengeluaran pemerintah, pengangguran, investasi, tenaga kerja dan PDRB terhadap ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera periode 2010- 2019, antara lain dengan formulasi sebagai berikut:

$$KPW_{it} = \beta_0 + \beta_1 PP_{it} + \beta_2 P_{it} + \beta_3 INV_{it} + \beta_4 TK_{it} + \beta_5 PDRB_{it} + e_{it}$$

Dimana:

KPW = Ketimpangan pembangunan wilayah hasil dari indeks williamson

PP = Pengeluaran pemerintah ke-i pada tahun ke-t

P = Pengangguran ke-i pada tahun ke-t

INV = Investasi ke-i pada tahun ke-t

TK = Tenaga kerja ke-i pada tahun ke-t

PDRB = PDRB ke-i pada tahun ke-t

$\beta_0$  = Intersep

$\beta_1$  hingga  $\beta_5$  = Koefisien

$e$  = *Standard error*

## **Pendekatan perhitungan model regresi data panel**

### **Common effect model (CEM)**

Dalam estimasinya, model *Common Effect Model* (CEM) diasumsikan bahwa setiap unit individu memiliki intersep dan *slope* yang sama (tidak ada perbedaan pada dimensi kerat waktu). Dengan kata lain, regresi panel data yang dihasilkan akan berlaku untuk setiap individu.

### **Fixed effect model (FEM)**

Menurut Gujarati & Porter dalam (Syarifah, 2020), efek yang berbeda tersebut dicerminkan pada nilai koefisien intersep, sehingga FEM akan mempunyai intersep yang berbeda untuk masing-masing provinsi. Meskipun intersep mungkin berbeda antar

subjek, akan tetapi intersep tidak berbeda dari waktu ke waktu.

### **Random effect model (REM)**

Model *Random Effect Model* (REM) diasumsikan bahwa terdapat efek sektor ataupun efek waktu pada komponen residual yang tidak berkorelasi dengan variabel dependen. Model ini lebih melihat pada perhitungan *error* (Syarifah, 2020). Menurut Wooldridge dalam (Syarifah, 2020), model *Random Effect Model* (REM) mempunyai estimasi *Generalized Least Squares* (GLS) yang menyatakan bahwa tidak menggunakan identifikasi autokorelasi dan heteroskedastisitas.

### **Pengujian model regresi data panel**

#### **Uji Chow**

Untuk mengetahui apakah model FEM lebih baik dibandingkan model PLS dengan melihat signifikansi model FEM dapat dilakukan dengan uji statistik F. Pengujian ini dikenal juga dengan istilah Uji *Chow* atau *Likelihood Test Ratio*.

#### **Uji lagrange multiplier (LM) atau breusch pagan**

Untuk mengetahui apakah model REM lebih baik dibandingkan model CEM/PLS, dapat digunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang dikembangkan oleh *Breusch-Pagan*. Pengujian ini didasarkan pada nilai residual dari model CEM/PLS (Hartini, 2017).

#### **Uji Hausman**

Untuk mengetahui apakah model *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dari model *Random Effect Model* (REM), maka digunakanlah uji *Hausman*. Pada uji ini mengikuti nilai distribusi *chi-square* dengan derajat jumlah variabel bebas (Gujarati & Porter dalam (Syarifah, 2020)).

### **Perumusan dan pengujian asumsi klasik**

#### **Uji normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode *Jarque-Bera Test*, apabila J-B hitung < nilai  $\chi^2$  (*Chi-Square*) tabel, maka nilai residual terdistribusi secara normal. Selain itu, untuk mendeteksi normal atau tidaknya distribusi residual bisa dideteksi dari nilai probabilitas J-B hitung. Jika nilai probabilitas dari J-B hitung lebih besar dari 0,05, maka residual terdistribusi secara normal.

#### **Uji multikolinearitas**

Multikolinearitas adalah kesalahan dalam suatu model terhadap asumsi klasik yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel-variabel bebas pada persamaan yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Menurut Gujarati & Porter dalam (Syarifah, 2020), apabila nilai dari koefisien korelasi memiliki nilai diatas 0,8 antara dua variabel independen, maka dapat terdeteksi gejala multikolinearitas.

#### **Uji autokorelasi**

Autokorelasi merupakan hubungan atau korelasi antar observasi dalam satu variabel atau korelasi antar *error* masa yang lalu dengan *error* saat ini (Syarifah, 2020). Masalah autokorelasi dapat diketahui dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial*

*Correlation LM Test* (Dhyatmika, 2013). Apabila nilai probabilitas *Obs\*R-squared* lebih besar dari  $\alpha$  (*alpha*) 5% (0,05), maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Bila nilai *Obs\*R-squared* lebih kecil dari  $\alpha$  (*alpha*) 5% (0,05), maka terjadi masalah autokorelasi.

### Uji heteroskedastisitas

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *white heteroscedasticity test* yang tersedia dalam program *Eviews* (Dhyatmika, 2013). Apabila nilai probabilitas *Chi-Square* dari *Obs\*R-squared* lebih besar dari  $\alpha$  (*alpha*) 5% (0,05), maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Bila nilai probabilitas *Chi-Square* dari *Obs\*R-squared*  $< \alpha$  (*alpha*) 5% (0,05), maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

### Pengujian hipotesis

#### Uji signifikansi simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien (*slope*) regresi secara bersamaan atau menyeluruh. Uji F memperlihatkan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (Widarjono dalam (Syarifah, 2020).

Hipotesis:  $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = 0$   
 $H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq 0$

#### Uji signifikansi parsial (Uji t)

Uji t digunakan dalam pengujian statistik untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun rumus t-hitung antara lain sebagai berikut (Syarifah, 2020): Hipotesis:  $H_0: \beta_i = 0$ , variabel X tidak signifikan terhadap variabel Y  $H_1: \beta_i \neq 0$ , variabel X signifikan terhadap variabel Y

#### Koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Menurut Gujarati dalam (Dhyatmika, 2013), koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) adalah angka yang memberikan proporsi atau presentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dinyatakan oleh variabel bebas (X). Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali dalam (Dewi, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nilai ketimpangan pembangunan wilayah antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010 – 2019

Berdasarkan tujuan penelitian yang pertama, yakni mengukur dan menganalisis besar nilai ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera. Nilai indeks williamson antar provinsi di pulau Sumatera tahun 2010 – 2019 yang ditampilkan pada Tabel 1, menunjukkan bahwa provinsi dengan perkembangan indeks williamson tertinggi di Sumatera tahun 2011 adalah Lampung sebesar 25,75% dan terendah adalah Kep. Riau sebesar -2,79%. Tahun 2012, Provinsi dengan perkembangan indeks williamson tertinggi di Sumatera adalah Lampung sebesar 3,48% dan terendah adalah Riau sebesar -6,73%. Tahun 2013, provinsi dengan perkembangan indeks williamson

tertinggi di Sumatera adalah Kep. Bangka Belitung sebesar 1,04% dan terendah adalah Riau sebesar -8,46%. Tahun 2014, provinsi dengan perkembangan indeks williamson tertinggi di Sumatera adalah Kep. Bangka Belitung sebesar 1,15% dan terendah adalah Lampung sebesar -17,02%.

**Tabel 1.** Indeks Williamson antar Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010–2019

Tahun	Provinsi										
	Aceh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Jambi	Sumatera Selatan	Bengkulu	Lampung	Kep. Bangka Belitung	Kep. Riau	Pulau Sumatera
2010	0,473	0,532	0,256	0,554	0,533	0,694	0,405	0,240	0,183	0,548	0,258
Perkembangan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011	0,461	0,543	0,256	0,563	0,530	0,697	0,408	0,302	0,180	0,533	0,254
Perkembangan (%)	-2,53%	2,17%	-0,12%	1,62%	-0,60%	0,34%	0,55%	25,75%	-1,40%	-2,79%	-1,73%
2012	0,454	0,553	0,254	0,525	0,519	0,708	0,408	0,312	0,182	0,528	0,244
Perkembangan (%)	-1,58%	1,89%	-0,53%	-6,73%	-2,12%	1,57%	0,03%	3,48%	1,00%	-0,86%	-3,64%
2013	0,437	0,548	0,255	0,481	0,503	0,713	0,404	0,313	0,184	0,520	0,234
Perkembangan (%)	-3,67%	-0,93%	0,13%	-8,46%	-3,14%	0,71%	-0,81%	0,26%	1,04%	-1,63%	-4,38%
2014	0,411	0,552	0,255	0,437	0,495	0,706	0,404	0,260	0,186	0,514	0,226
Perkembangan (%)	-5,95%	0,65%	0,15%	-9,08%	-1,48%	-0,95%	-0,17%	-17,02%	1,15%	-1,15%	-3,37%
2015	0,384	0,555	0,257	0,419	0,484	0,706	0,405	0,260	0,191	0,506	0,214
Perkembangan (%)	-6,55%	0,54%	0,63%	-4,10%	-2,19%	0,04%	0,32%	0,13%	2,60%	-1,43%	-5,02%
2016	0,388	0,561	0,259	0,392	0,470	0,705	0,407	0,262	0,193	0,502	0,205
Perkembangan (%)	1,13%	1,19%	0,81%	-6,46%	-2,91%	-0,15%	0,37%	0,69%	1,33%	-0,91%	-4,25%
2017	0,383	0,566	0,261	0,369	0,465	0,709	0,405	0,263	0,196	0,495	0,195
Perkembangan (%)	-1,34%	0,74%	0,97%	-5,96%	-1,18%	0,57%	-0,39%	0,27%	1,40%	-1,33%	-5,22%
2018	0,384	0,570	0,264	0,350	0,468	0,715	0,404	0,264	0,199	0,464	0,186
Perkembangan (%)	0,29%	0,87%	0,95%	-4,98%	0,74%	0,85%	-0,20%	0,43%	1,48%	-6,20%	-4,49%
2019	0,384	0,576	0,267	0,330	0,468	0,720	0,402	0,265	0,214	0,451	0,178
Perkembangan (%)	-0,17%	0,91%	1,05%	-5,70%	-0,01%	0,63%	-0,45%	0,47%	7,53%	-2,85%	-4,31%
<b>Rata-Rata</b>	0,416	0,556	0,258	0,442	0,494	0,707	0,405	0,274	0,191	0,506	0,219
<b>Keterangan</b>	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah

Sumber: (BPS, 2020b) dan (BPS, 2020a), (diolah)

Tahun 2015, provinsi dengan perkembangan indeks williamson tertinggi di pulau Sumatera adalah Kep. Bangka Belitung yaitu sebesar 2,60% dan terendah adalah Aceh sebesar -6,55%. Tahun 2016, provinsi dengan perkembangan indeks williamson tertinggi di pulau Sumatera adalah Kep. Bangka Belitung sebesar 1,33% dan terendah adalah Riau sebesar -6,46%. Tahun 2017, provinsi dengan perkembangan indeks williamson tertinggi di Sumatera adalah Kep. Bangka Belitung sebesar 1,40% dan terendah adalah Riau sebesar -5,96%. Tahun 2018, provinsi dengan perkembangan indeks williamson tertinggi di Sumatera adalah Kep. Bangka Belitung sebesar 1,48% dan yang terendah adalah Kep. Riau sebesar -6,20%. Tahun 2019, provinsi dengan perkembangan indeks williamson tertinggi di Sumatera adalah Kep. Bangka Belitung sebesar 7,53% dan terendah adalah Riau sebesar -5,70%.

Pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran, investasi, tenaga kerja dan PDRB terhadap ketimpangan pembangunan wilayah antar Provinsi di Pulau Sumatera.

Berdasarkan tujuan penelitian yang kedua, yakni menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran, investasi, tenaga kerja dan PDRB terhadap ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera. Dari hasil pengujian *Chow*, *Lagrange Multiplier* (LM) dan *Hausman* didapatkan bahwa model regresi data panel yang terbaik yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

Model regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM) pada KPW sebagai berikut:

$$KPW_{it} = \beta_0 + \beta_1 PP_{it} + \beta_2 P_{it} + \beta_3 INV_{it} + \beta_4 TK_{it} + \beta_5 PDRB_{it} + \mu_{it}$$

$$KPW = 0.638068 - 4.83E-09 PP - 7.30E-07 P - 5.83E-09 INV - 5.13E-08 TK + 9.47E-10 PDRB + \mu$$

Dimana:

KPW = Ketimpangan pembangunan wilayah

PP = Pengeluaran pemerintah

P = Pengangguran

INV = Investasi

TK = Tenaga kerja

PDRB = PDRB ADHK menurut pengeluaran

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$  = Koefisien regresi

$\mu$  = Variabel pengganggu

**Tabel 2.** Hasil estimasi regresi data panel dengan metode FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.638068	0.048896	13.049430	0.0000
PP?	-4.83E-09	2.49E-09	-1.9417030	0.0555
P?	-7.30E-07	1.24E-07	-5.8660980	0.0000
INV?	-5.83E-09	1.04E-09	-5.5892320	0.0000
TK?	-5.13E-08	2.44E-08	-2.1047030	0.0383
PDRB?	9.47E-10	2.35E-10	4.0339680	0.0001
Fixed Effects (Cross)				
_ACEH_--C	0.032163			
_SUMUT_--C	0.461542			
_SUMBAR_--C	-0.184467			
_RIAU_--C	-0.026722			
_JAMBI_--C	-0.053272			
_SUMSEL_--C	0.423891			
_BENGKULU_--C	-0.150588			
_LAMPUNG_--C	-0.061448			
_KEPBABEL_--C	-0.404149			
KEPRI_--C	-0.036951			

Sumber: *Data diolah, 2021*

Dari hasil regresi data panel dengan model *fixed effect* yang ditunjukkan pada Tabel 2, apabila selama periode 2010 - 2019 pengeluaran pemerintah, pengangguran, investasi, tenaga kerja dan PDRB diasumsikan tetap, maka ketimpangan pembangunan wilayah selama periode penelitian adalah sebesar 0,64.

Jika pengeluaran pemerintah naik 1 juta rupiah, maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah sebesar 0,00483, dengan asumsi variabel

pengangguran, investasi, tenaga kerja dan PDRB tetap. Jika pengangguran naik 1 orang, maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah sebesar 0,00000073, dengan asumsi variabel pengeluaran pemerintah, investasi, tenaga kerja dan PDRB tetap. Jika investasi naik 1 juta rupiah, maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah sebesar 0,00583, dengan asumsi variabel pengeluaran pemerintah, pengangguran, tenaga kerja dan PDRB tetap.

Jika tenaga kerja naik 1 orang, maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah sebesar 0,000000513, dengan asumsi variabel pengeluaran pemerintah, pengangguran, investasi dan PDRB tetap. Jika PDRB naik 1 juta rupiah, maka akan meningkatkan ketimpangan pembangunan sebesar 0,000947, dengan asumsi variabel pengeluaran pemerintah, pengangguran, investasi dan tenaga kerja tetap.

### Uji signifikansi simultan (Uji F)

Pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 291.0529 dengan probabilitas sebesar (0.000000) atau lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,000000 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya secara simultan atau bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah, pengangguran, investasi, tenaga kerja dan PDRB terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.

**Tabel 3.** Hasil uji F

Root MSE	0.021405	R-squared	0.979566
Mean dependent var	0.424890	Adjusted R-squared	0.976200
S.D. dependent var	0.150496	S.E. of regression	0.023217
Akaike info criterion	-4.550363	Sum squared resid	0.045818
Schwarz criterion	-4.159587	Log likelihood	242.5181
Hannan-Quinn criter.	-4.392209	F-statistic	291.0529
Durbin-Watson stat	0.857373	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: *Data diolah, 2021*

### Uji signifikansi parsial (Uji t)

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa pengujian variabel PP (X1) dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar -1.941703 dengan probabilitas variabel PP (X1) sebesar 0.0555 atau sama dengan nilai  $\alpha = 0,05$  ( $0.0555 = 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti variabel PP secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap KPW. Variabel P (X2) dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar -5.866098 dengan probabilitas variabel P sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $0.0000 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti variabel P secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap KPW.

**Tabel 4.** Hasil uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.638068	0.048896	13.04943	0.0000
PP?	-4.83E-09	2.49E-09	-1.941703	0.0555
P?	-7.30E-07	1.24E-07	-5.866098	0.0000
INV?	-5.83E-09	1.04E-09	-5.589232	0.0000
TK?	-5.13E-08	2.44E-08	-2.104703	0.0383
PDRB?	9.47E-10	2.35E-10	4.033968	0.0001

Sumber: *Data diolah, 2021*



Variabel INV (X3) dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar -5.589232 dengan probabilitas variabel INV sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $0.0000 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti variabel INV secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap KPW. Variabel TK (X4) dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar -2.104703 dengan probabilitas variabel TK sebesar 0.0383 atau lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $0.0383 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti variabel TK secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap KPW. Kemudian, variabel PDRB (X5) dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 4.033968 dengan probabilitas variabel PDRB sebesar 0.0001 atau lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $0.0001 < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti variabel PDRB secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap KPW.

### **Koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Dari hasil olahan data, diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,976200, artinya: variasi perubahan (naik/turunnya) variabel ketimpangan pembangunan wilayah selama periode 2010 – 2019 mampu dijelaskan dengan baik oleh variabel pengeluaran pemerintah, pengangguran, investasi, tenaga kerja dan PDRB dengan besaran 97,62%. Sedangkan sisanya sebesar 2,38% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian.

### **Implikasi**

Berdasarkan hasil olahan data, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Pengeluaran pemerintah seharusnya dapat mengurangi ketimpangan pembangunan. Perbaikan sarana dan prasarana dapat berupa perbaikan jalan raya, gedung kesehatan, gedung pendidikan, dan lain-lain. Dengan adanya perbaikan sarana prasarana seharusnya dapat meningkatkan investasi yang nantinya akan meningkatkan pembangunan, sehingga ketimpangan dapat sedikit teratasi. Hal ini menggambarkan bahwa pengeluaran pemerintah yang sesuai (proporsional) pada setiap provinsi di pulau Sumatera dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Selain itu, pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk merealisasikan program-program yang bersifat produktif akan dapat menstimulus perekonomian, sehingga tercipta pemerataan pembangunan dan menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di pulau Sumatera.

Hasil olahan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Disaat tingginya jumlah pengangguran seharusnya akan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga mengurangi kegiatan produksi barang dan jasa. Dikarenakan tidak adanya pendapatan, maka ini juga berdampak pada berkurangnya penghasilan pajak yang diterima oleh pemerintah, menurunnya aktivitas investasi, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, terhambatnya pembangunan daerah dan menyebabkan ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera meluas. Selain itu, variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Hubungan negatif investasi terhadap ketimpangan pembangunan sesuai dengan teori Myrdal mengenai dampak balik (*backwash effect*) yang lebih kuat dari dampak sebar (*spread effect*), sehingga perpindahan modal dan motif laba akan mendorong berkembangnya pembangunan, yang hanya terpusat pada wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa investasi yang proporsional ataupun cenderung besar akan mampu menaikkan laju perekonomian pada setiap provinsi di Pulau Sumatera.

Selain itu, kebijakan investasi juga mempengaruhi tinggi rendahnya investasi di suatu wilayah. Ini disebabkan investasi akan cenderung masuk ke wilayah yang maju, dikarenakan memiliki kualitas SDM yang memadai dan infrastruktur yang baik. Hal ini dapat mengakibatkan investasi hanya terpusat pada wilayah yang maju saja, sehingga menyebabkan distribusi investasi menjadi senjang, menghambat pembangunan dan melebarnya ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera.

Kemudian, variabel tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Hal ini menggambarkan bahwa tenaga kerja yang terserap dengan baik akan mendorong peningkatan pendapatan dan pertumbuhan. Sehingga, mengurangi jumlah pengangguran, distribusi pendapatan menjadi merata, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi naik, terciptanya pemerataan pembangunan dan menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di Pulau Sumatera.

Selanjutnya, variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Dalam Todaro & Smith (2011) menjelaskan masalah yang terjadi bukan hanya soal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akantetapi siapa saja yang akan berkontribusi untuk menumbuhkannya, apakah sebagian kecil orang atau banyak orang. Apabila peningkatan hanya dilakukan oleh sebagian orang yang merupakan berpendapatan tinggi, maka peningkatan yang terjadi akan memberikan banyak manfaat bagi bagi mereka. Akan tetapi jika pertumbuhan dihasilkan oleh banyak orang, maka mereka pula yang akan ikut merasakan manfaatnya, sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih merata.

Masalah yang sering terjadi adalah ketika pertumbuhan ekonomi tidak memberikan manfaat bagi orang miskin, sehingga menyebabkan memburuknya ketimpangan dan kemiskinan. Dalam penelitian Rosyadi (2017), menjelaskan penyebab pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan adalah saat pertumbuhan ekonomi meningkat namun pemerataan pembangunan tidak dirasakan oleh seluruh kalangan. Pertumbuhan hanya mengurangi ketimpangan di tahap awal pembangunan, untuk tahap berikutnya pertumbuhan yang meningkat tidak beriringan dengan pemerataan pembangunan yang merata. Sehingga, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat tidak memberikan pengaruh apapun terhadap ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberikan pengaruh secara langsung terhadap ketimpangan karena ukuran perhitungannya tidak berdasarkan pendapatan nasional.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hasil pengukuran menggunakan formulasi rumus indeks williamson, menunjukkan bahwa provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kep. Riau tergolong kedalam ketimpangan tinggi, yang berarti bahwa pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi tersebut belum merata. Kemudian, provinsi Aceh, Riau, Jambi dan Bengkulu tergolong kedalam ketimpangan sedang, yang berarti bahwa pembangunan antar kabupaten/kota di provinsi tersebut belum cukup merata. Selanjutnya, provinsi Sumatera Barat, Lampung dan Kep. Bangka Belitung tergolong kedalam ketimpangan rendah, yang berarti bahwa pembangunan antar kabupaten/kotadi provinsi tersebut cukup merata.

Hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), diperoleh hasil bahwa variabel pengeluaran pemerintah, pengangguran, investasi dan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Di sisi lain, variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.

## Saran

Diperlukan kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan (*Growth Poles*) secara merata pada setiap provinsi di Pulau Sumatera. Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini dilakukan untuk mendorong proses pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada kota-kota skala kecil dan menengah. Sehingga, tercipta pemerataan pembangunan dan menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di pulau Sumatera.

Pelaksanaan program-program yang bersifat produktif sangat diperlukan dalam menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah antar provinsi di pulau Sumatera yang direalisasikan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah yang proporsional, perluasan lapangan kerja, pemerataan distribusi investasi, pengembangan sumber daya manusia secara intensif, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pada sektor unggulan yang menjadi sumber utama pertumbuhan pada setiap provinsi di Pulau Sumatera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asih, W. (2015). Analisis Ketimpangan dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta
- Bappenas.(2013). Analisis kesenjangan antarwilayah 2013. Diakses dalam <https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/document/Publikasi/DokPub/Analisis%20Kesenjangan%20sosial2013.pdf>. Diakses 11 Februari 2021.
- BPS. (2014). Konsep definisi variabel pengangguran. SIRUSA BPS. Dalam <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/945>. Diakses 20 Februari 2021.
- BPS. (2020a). Jumlah penduduk Kabupaten/Kota Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2010-2019. Dalam <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>. Diakses 22 Februari 2021.
- BPS. (2020b). Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota, Buku 1 Pulau Sumatera. Diakses dalam <https://www.bps.go.id/publication/2020/10/05/4626e766e8e153dc09812f3e/tinjauan-regional-berdasarkan-pdrb-kabupaten-kota-2015-2019--buku-1-pulau-sumatera>. Diakses 2 Maret 2021.
- Dewi, R. (2018). Analisis ketimpangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar
- Dhyatmika, K. W. (2013). Analisis ketimpangan pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. *Diponegoro Journal of Economics*. 2 (2), 1- 8
- H Harlik, A Amir, H Hardiani. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 1 (2), 109-120
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB per kapita, investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta
- Junaidi, J., Rustiadi, E., Sutomo, S. & Juanda, B. (2012). Pengembangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Era Otonomi Daerah: Kajian Khusus Interaksi Permukiman Transmigrasi dengan Desa Sekitarnya. *Visi Publik*, 9(1), 522-534

- PH Prihanto, A Bhakti. (2017). Profile of informal sector workers and factors affecting informal sector employment in Jambi Province, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 5 (2), 63-70
- R Rosmeli, N Nurhayani. (2014). Studi komperatif ketimpangan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan* 3 (1), 456-463
- S Rahmadi, P Parmadi. (2019). Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia, *Jurnal Paradigma Ekonomika* 14 (2), 55-66
- S Sunargo, D Hastuti. (2019). Mengatasi perilaku kerja kontraproduktif melalui peran integratif politik organisasional dan kecerdasan emosional pada era revolusi industri 4.0, *Jurnal Paradigma Ekonomika* 14 (2), 45-54
- Syarifah, L. N. (2020). *Determinan ketimpangan pembangunan antarwilayah pada Provinsi-Provinsi di Indonesia*. Skripsi. Universitas Pertamina: Jakarta.
- Y Yusral, J Junaidi, A Bhakti. (2015). Klasifikasi Pertumbuhan, Sektor Basis dan Kompetitif Kota Jambi, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 2 (4), 209-216